

## ABSTRAK

### **PERANAN PEMERINTAH DESA KEBUNDADAP TIMUR DALAM PEMBANGUNAN PARIWISATA BERWAWASAN LINGKUNGAN (STUDI KASUS WISATA MANGROVE KEBUNDADAP TIMUR)**

Oleh : Mifta Faried Ferdianto

Pembimbing : Hidayat Andiyanto, S.H., M.Si. dan Arif Santoso, S.H., M.Si.

Perkembangan pariwisata dari tahun ke tahun sangat pesat yang disebabkan oleh perubahan struktur sosial ekonomi dan semakin banyak orang yang memiliki pendapatan lebih dari sebelumnya. Pembangunan pariwisata perlu memperhatikan kondisi daerah yang menjadi objek wisata untuk menghindari terjadinya kerusakan lingkungan akibat dari pengelolaan tempat wisata. Oleh sebab itu, pembangunan pariwisata perlu memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini dibuat dalam rangka untuk mengetahui Peranan Pemerintah Desa Kebundadap Timur dalam pembangunan pariwisata Mangrove dan faktor penghambat dalam pengembangan obyek wisata mangrove Kebundadap Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian sosio legal dengan pendekatan kualitatif. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini seluruh masyarakat Desa Kebundadap Timur yang terlibat secara langsung dalam pembangunan Wisata *Mangrove* Kedatim. sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Kebundadap Timur yang terdiri dari Kepala Desa beserta aparatnya dan pengelola Wisata *Mangrove* Kedatim.

Peranan pemerintah desa adalah kewenangan pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembangunan kepariwisataan merupakan proses perubahan menuju arah yang lebih baik yang meliputi perencanaan, implementasi, dan pengendalian terkait dengan kegiatan pariwisata. Untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan pariwisata diperlukan pemahaman baik dari sisi pemerintah selaku regulator maupun dari sisi pengusaha selaku pelaku bisnis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan pemerintah desa dalam pembangunan wisata mangrove ini adalah sebagai pengawas kegiatan usaha mangrove dan untuk pengelolah sendiri adalah dari pihak BUMDes. Selain berperan sebagai pengawas, pemerintah desa juga berperan sebagai wirausaha dan sebagai koordinator.

Berdasarkan peranan tersebut, maka Pemerintah Desa kebundadap timur telah melaksanakan tugasnya dengan berperan dalam pengembangan potensi sumber daya yang dimiliki desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor yang menjadi penghambat dalam pengembangan WMK adalah faktor potensi wisata, faktor dana, faktor partisipasi masyarakat, faktor keterlibatan Pemerintah Desa, faktor manajemen pengurus BUMDes, faktor pemasaran, dan faktor dukungan PEMKAB.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Pariwisata, Lingkungan

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF KEBUNDADAP TIMUR VILLAGE GOVERNMENT IN DEVELOPMENT OF ENVIRONMENTAL TOURISM (CASE STUDY OF KEBUNDADAP TIMUR MANGROVE TOURISM)**

By : Mifta Faried Ferdianto

Supervisor : Hidayat Andiyanto, S.H., M.Sc. and Arif Santoso, S.H., M.Sc.

The development of tourism from year to year is very rapid due to changes in the socio-economic structure and more and more people who have more income than before. Tourism development needs to pay attention to the condition of the area that becomes a tourist attraction to avoid environmental damage due to the management of tourist attractions. Therefore, tourism development needs to pay attention to the principles of environmentally sound development. This study was made in order to determine the role of the Kebundadap Timur Village Government in the development of Mangrove tourism and the inhibiting factors in the development of Kebundadap Timur mangrove tourism objects. This study uses a type of socio-legal research with a qualitative approach. The population used in this study was all the people of Kebundap Timur Village who were directly involved in the development of Kedatim Mangrove Tourism. The sample in this study is the Kebundadap Timur Village Government consisting of the Village Head and his apparatus and the manager of Kedatim Mangrove Tourism.

The role of the village government is the authority of the government in carrying out its duties and functions in accordance with the rights and obligations based on the applicable laws and regulations. Tourism development is a process of change towards a better direction which includes planning, implementation, and control related to tourism activities. To achieve success in tourism development, an understanding is needed both from the government side as a regulator and from the entrepreneur side as a business actor.

The results of the study indicate that the role of the village government in the development of mangrove tourism is as a supervisor for mangrove business activities and for the manager itself is from the BUMDES. In addition to acting as a supervisor, the village government also acts as an entrepreneur and as a coordinator.

Based on this role, the village government of Kebundadap Timur has carried out its duties by playing a role in developing the potential of village resources in accordance with Law Number 6 of 2014. The inhibiting factors in developing WMK are tourism potential factors, funding factors, community participation factors, the village government involvement factor, the BUMDes management management factor, the marketing factor, and the PEMKAB support factor.

Keywords: Role of Government, Tourism, Environment